

## Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Alokasi Belanja Modal

### *The Influence Of Local Government Financial Performance On Capital Expenditure Allocation Policy*

Nica Tria Utami<sup>a</sup>, Erma Setiawati<sup>b\*</sup>

Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>a,b</sup>

<sup>a</sup>b200220557@student.ums.ac.id, <sup>b</sup>es143@ums.ac.id\*

#### **Abstract**

*The implementation of regional autonomy requires local governments to be able to manage finances effectively, efficiently, and independently to support public service delivery and regional development. This study aims to analyze the influence of local government financial performance on capital expenditure allocation policies in Regency/City Governments across Central Java for the 2021–2024 period. In this study, regional financial performance is measured using the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, and Local Original Revenue Growth Ratio. This research employs a quantitative approach using secondary data sourced from the Regional Government Financial Reports (LKPD) audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). The sampling technique utilizes a purposive sampling method, involving a total of 35 regency/city governments over four years of observation, resulting in 140 data observations. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The research results indicate that the Independence Ratio shows a significant influence on Capital Expenditure Allocation. Meanwhile, the Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, and Local Original Revenue (PAD) Growth Ratio do not show an influence on Capital Expenditure Allocation. These findings are expected to serve as a consideration for local governments in formulating regional financial management policies that are more effective and oriented toward sustainable development.*

**Keywords:** Local Government Financial Performance; Capital Expenditure; Independence Ratio; Efficiency Ratio; Local Government.

#### **Abstrak**

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan mandiri guna mendukung penyediaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kebijakan alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah periode 2021–2024. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan total 35 pemerintah daerah kabupaten/kota selama empat tahun pengamatan sehingga diperoleh 140 data observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sementara itu Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak menunjukkan pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan Daerah; Belanja Modal; Rasio Kemandirian; Rasio Efisiensi; Pemerintah Daerah.

## **1. Pendahuluan**

Sejarah pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada masa kolonial, mengusung pemerintah yang sentralistik yang berarti pemerintah daerah dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat. Sentralistik mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat mengembangkan potensi daerah pusat dan hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal pada pemerintah daerah menjadi terhambat. Hal ini berkelanjutan hingga pada masa awal kemerdekaan kemudian mengalami perubahan signifikan pada masa orde baru yang merumuskan kebijakan desentralisasi. Puncak perubahan dasar pelaksanaan pemerintah daerah terjadi pada masa reformasi. Dasar hukum pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan amandemen UUD 1945.

Desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Suriadi et al., 2023). Untuk meningkatkan kemandirian pada pemerintah daerah serta mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat perlu diterapkannya desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah mendapatkan hak dan wewenang untuk mengembangkan daerahnya dengan cara memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan ekonomi daerah. Namun, terdapat tantangan dalam tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah untuk memastikan desentralisasi dapat mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh. Secara garis besar, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi mencakup kompetensi dan kinerja daerah dalam menggunakan APBD, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan struktur belanja yang belum memuaskan (A. Putri et al., 2022). Hal tersebut berdampak pada ketidak fokusan dan kurang efektif pemerintah daerah dalam membenahi pelayanan dan pemerataan pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki peran aktif dalam memberikan aktivitas pelayanan publik bagi masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi kunci terpenuhinya layanan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara untuk mengelola dan memberikan pelayanan public yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Masyarakat adalah dengan menggunakan hak dan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada suara aspirasi masyarakat. Ditinjau dari penyelenggaraannya kinerja birokrasi pelayanan publik dipengaruhi oleh budaya paternalisme yang masih kuat yang mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan, mereka menempatkan dirinya sebagai penguasa, dan memperlakukan para pengguna jasa (publik) sebagai obyek pelayanan yang membutuhkan bantuannya. Akibatnya, kinerja birokrasi pelayanan public cenderung kurang baik. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dapat mencapai standar pelayanan publik pada pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat dan daerah, potensi dan keberagaman daerah, serta memperhatikan peluang dan daya saing yang ada dengan memberikan hak dan kewenangan penuh kepada pemerintah

daerah sesuai dengan sistem penyelenggaraan otonomi daerah. Diselenggarakannya otonomi daerah berdasarkan pola penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik di masa lampau sudah tidak efisien dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam otonomi daerah pemerintah daerah berhak mengatur urusannya sendiri berdasarkan asas otonomi yang diharapkan dapat membantu mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang merata. Hal tersebut dapat tercapai melalui peningkatan, pelayanan, pengelolaan sumber daya, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan asas demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang baik dapat memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan dan pertumbuhan daerah setempat. Semakin banyak sumber daya yang diperhatikan dan dikelola oleh pemerintah maka semakin banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang besar berbanding lurus dengan peningkatan belanja modal. Belanja modal merupakan salah satu pengeluaran yang penting bagi pemerintah dalam pembangunan. Dengan alokasi belanja modal yang tinggi diharapkan dapat memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Belanja modal merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini termasuk dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan serta dana otonomi khusus. Belanja modal secara langsung antara lain untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud seperti pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ekonomi, dan sarana transportasi yang akan memberikan dampak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk kesejahteraan. Belanja modal pada pemerintahan daerah memegang peran sebagai daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian yang terdapat pada daerah tersebut maka dari itu, belanja modal itu sendiri mempunyai pengaruh penting dalam daerah dan manfaatnya dapat dirasakan selama satu tahun kedepan (Oktavianti & Idayati, 2020)

Tuntutan kinerja yang tinggi terhadap akuntabilitas kinerja daerah pada akhirnya mengarah pada kebutuhan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Keberhasilan kinerja pemerintah yang sudah dilakukan dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Dengan adanya pengukuran kinerja keuangan dapat mengetahui akuntabilitas dari pemangku kepentingan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan yang akan direalisasikan. efektivitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan alokasi yang lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan daerah adalah tanda bahwa kinerja keuangan daerah baik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Analisis keuangan merupakan usaha untuk mengidentifikasi kondisi keuangan pemerintah daerah dengan cara melakukan perhitungan rasio keuangan. Terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah diantaranya adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Analisa kinerja keuangan bertujuan untuk mengevaluasi performa pemerintah daerah pada periode yang telah lewat melalui sejumlah analisa, dan digunakan untuk mendapatkan kondisi keuangan

yang dapat menunjukkan situasi aktual dan kinerja potensial yang akan dilakukan pada tahun berikutnya (Bayu Kusumaningrum & Sugiyanto, 2021).

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan bentuk tolak ukur pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Tingkat kemandirian pemerintah daerah dapat ditunjukkan melalui besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan hak pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai otonomi daerah. Komponen PAD didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya. Semakin tinggi rasio kemandirian maka dapat diartikan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin rendah. Hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk mengelola potensi daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Rasio kemandirian juga berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam pembangunan daerah melalui kesadaran dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Rasio efektivitas keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Rasio efektivitas menunjukkan bagaimana pemerintah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan yang dimiliki. Rasio efektivitas PAD dapat dihitung melalui perbandingan dari realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Semakin tinggi rasio efektivitasnya maka semakin tinggi pula kemampuan dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam melaksanakan pembangunan daerahnya.

Untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai kinerja keuangan daerah, rasio efektivitas dilengkapi dengan efisiensi rasio. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara total beban pokok penerimaan dengan realisasi penerimaan (Ula & Bharata, 2022). Semakin rendah rasio efisiensi ekonomi daerah, semakin baik kinerja ekonomi pemerintah daerah. Rasio efektivitas dapat menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi belanja modal yang optimal untuk pembangunan dan belanja. Semakin rendah rasio alokasi modal terhadap pengeluaran, maka semakin tinggi proporsi modal investasi yang digunakan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur bagi masyarakat.

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui kinerja anggaran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Tingginya rasio pertumbuhan masing – masing pos pendapatan dan pengeluaran menandakan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Dengan sumber daya yang terbatas pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja modal yang bersifat produktif. Adanya pergeseran pola belanja dalam pemerintah daerah khususnya belanja modal untuk pelayanan publik memicu permasalahan tentang sejauh mana besarnya pendapatan daerah mempengaruhi pola belanja pemerintah daerah khususnya belanja modal untuk pelayanan publik (Novita

& Nurhasanah, 2020). Peningkatan pelayanan publik dapat terwujud apabila pemerintah daerah dalam menggunakan sumber pendapatannya lebih banyak untuk belanja modal. Belanja modal merupakan keluaran yang digunakan untuk memperoleh aset yang bermanfaat bagi pemerintah daerah selama satu periode.

Menurut sebuah penelitian (Setiawan, 2019) pertumbuhan keuangan daerah mempengaruhi belanja modal. Kemudian, Derajat desentralisasi berdampak pada belanja modal, menurut penelitian lebih lanjut (Novita & Nurhasanah, 2020). Hal ini bertolak belakang dengan penegasan bahwa belanja modal tidak dipengaruhi oleh derajat desentralisasi (Andriyani et al., 2020). Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah pada tahun 2021-2024).”

## **2. Tinjauan Literatur**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memiliki kuasa untuk memperkerjakan agen sesuai kepentingannya. Teori ini fokus pada desain kontrak untuk mengatasi masalah keagenan dan biaya yang timbul akibat pendelegasian pengambilan keputusan, seperti alokasi sumber daya, koordinasi antar sub-unit, serta penetapan harga dan biaya, yang jika tidak dikelola dapat menurunkan efisiensi dan menimbulkan penggelembungan biaya (Hendrastuti & Harahap, 2023). Teori ini merupakan bagian dari teori akuntansi positif, teori permainan, dan teori organisasi, dengan penelitian yang bisa bersifat deduktif maupun induktif, meski berakar pada keuangan dan ekonomi. Dalam konteks sektor publik, teori agensi sejalan dengan sistem otonomi di Indonesia, di mana pemerintah daerah menjalankan kewenangan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemerintah pusat. Contohnya, rancangan anggaran daerah disusun dengan persetujuan pusat sebagai prinsipal, sehingga kegiatan pemerintah daerah dapat terealisasi dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemerintah pusat.

### **Belanja Modal**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja modal didefinisikan sebagai seluruh biaya yang dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran dan tidak diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah, berupa belanja investasi yang diakui pada neraca untuk perolehan atau pembangunan aset sampai siap digunakan, meliputi tanah, gedung dan bangunan operasional, peralatan dan mesin (kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor), serta aset tidak berwujud. Belanja modal diklasifikasikan menjadi belanja publik, seperti pembangunan jembatan, irigasi, jaringan, gedung sekolah dan kesehatan, serta modal ambulan yang dapat langsung dimanfaatkan masyarakat, dan belanja aparatur, seperti gedung dewan atau mobil dinas, yang menunjang kegiatan kerja aparatur (PP No. 71 Tahun 2010). Pengalokasian belanja modal yang tepat mendukung keberlangsungan infrastruktur publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan yang optimal.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Alokasi Belanja Modal**

Rasio kemandirian menggambarkan mengenai tingkat ketergantungan daerah terhadap alokasi dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian memiliki arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak ekstern terutama pada pemerintah tingkat pusat begitupun sebaliknya. Tingkat keikutsertaan Masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah tinggi maka rasio kemandiriin juga ikut tinggi. Sehingga, akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diinginkan

Pada penelitian yang dilakukan oleh (R. S. Putri & Rahayu, 2019), (I Putu Santika & Ida Bagus Made Punia Adnyana, 2022), (Talumewo et al., 2020) dan (Bayu Kusumaningrum & Sugiyanto, 2021) dimana rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bayu Kusumaningrum & Sugiyanto, 2021) menghasilkan hipotesis bahwa rasio kemandirian menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal yang disebabkan DAU dengan jumlah yang cukup besar namun penggunaan dana tersebut tidak dialokasikan untuk belanja modal daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

#### **H<sub>1</sub>; Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal**

### **Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Alokasi Belanja Modal**

Rasio efektifitas merupakan penjabaran terkait kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang ditargetkan kemudian dibandingkan dengan target yang disetujui berdasarkan potensi daerah sekitar. Rasio efektivitas PAD dapat dihitung melalui perbandingan dari realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Semakin tinggi tingkat efektivitas PAD maka semakin baik kinerja pemerintah dalam merealisasikan PAD daerahnya karena dapat diartikan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah dengan proporsi yang baik apabila nilai realisasi yang dihasilkan lebih besar daripada target yang dianggarkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Bayu Kusumaningrum & Sugiyanto, 2021) dimana rasio efektivitas menyatakan bahwa belanja modal dipengaruhi secara positif oleh rasio efektivitas. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianti & Idayati, 2020) dan (R. S. Putri & Rahayu, 2019) menunjukkan variabel efektivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rasio belanja modal. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Andriyani et al., 2020) dan (Novita & Nurhasanah, 2020) rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

#### **H<sub>2</sub>; Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal**

### **Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Alokasi Belanja Modal**

Rasio efektifitas merupakan penjabaran terkait kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang ditargetkan kemudian dibandingkan dengan target yang disetujui berdasarkan potensi daerah sekitar. Rasio efektivitas PAD dapat dihitung melalui perbandingan dari realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Semakin tinggi tingkat efektivitas PAD maka semakin baik kinerja pemerintah dalam merealisasikan PAD daerahnya karena dapat diartikan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah dengan proporsi yang baik apabila nilai realisasi yang dihasilkan lebih besar daripada target yang dianggarkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianti & Idayati, 2020) dan (R. S. Putri & Rahayu, 2019) memaparkan bahwa variabel efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2019) dan (Novita & Nurhasanah, 2020) yang menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah berdampak pada alokasi belanja modal. Selanjutnya, penelitian berikutnya juga mendukung bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal (Andriyani et al., 2020)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>; Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal**

### **Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap Alokasi Belanja Modal**

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kinerja anggaran pemerintah daerah dalam mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja daerah baik secara negatif maupun positif. Diharapkan rasio pertumbuhan berada pada angka positif dan kecenderungan (*trend*) mengalami peningkatan. Namun, apabila terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal tersebut menjadi ciri penurunan kinerja pendapatan serta harus mencari penyebab dan solusinya. Sumber PAD berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keberhasilan pemerintah dalam mempertahankan atau meningkatkan keberhasilan yang direncanakan dapat diukur menggunakan rasio ini.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianti & Idayati, 2020) dan (Sarina Dewi et al., 2022) menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Asli Daerah yang diukur menggunakan total aset berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. PAD terus mengalami peningkatan bahkan yang signifikan agar dapat secara signifikan meningkatkan alokasi belanja modal (Andriyani et al., 2020). Namun, penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian oleh (I. G. Siregar, 2022) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi belanja daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>; Rasio Pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.**

### **3. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanasi komparatif untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten Se-Jawa Tengah tahun 2021–2024. Populasi penelitian adalah laporan keuangan Pemda yang sudah diaudit BPK, dengan sampel diambil melalui purposive sampling berdasarkan kelengkapan data (Sugiyono, 2021). Variabel independen mencakup rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel dependen adalah alokasi belanja modal sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heterokedastisitas), serta regresi linier berganda untuk menilai pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap alokasi belanja modal, dengan pengujian signifikansi menggunakan uji F, uji T, dan koefisien determinasi R<sup>2</sup> (Ghozali, 2021).

#### 4. Hasil Dan Pembahasan

##### Deskripsi Objek Penelitian

Analisis data pada bab ini menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan PAD terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tahun 2021–2024. Data penelitian berupa data sekunder dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemda yang diperoleh dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang memberikan gambaran informasi lengkap terkait variabel penelitian. Populasi penelitian mencakup seluruh Pemda se-Jawa Tengah dengan sampel diambil menggunakan purposive sampling berdasarkan kelengkapan laporan dan kriteria tertentu, sehingga memungkinkan analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara akurat:

Tabel 1. Daftar Kriteria Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Populasi; Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	35
2.	Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2021-2024	(0)
3.	Kabupaten/Kota yang tidak melaporkan laporan keuangan secara lengkap terakut variabel penelitian	(0)
	Jumlah Sampel Akhir	35
	Jumlah Sampel (x4 tahun)	140

Sumber: Hasil Analisis Data, 2026

##### Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang menguji pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan PAD terhadap Alokasi Belanja Modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 140 sampel.

##### Uji Analisis Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Rasio Kemandirian	140	12,52	112,61	28,3880	16,78099
Rasio Efektivitas	140	72,04	143,81	106,4126	12,49851
Rasio Efisiensi	140	70,84	110,31	99,9175	5,48678
Rasio Pertumbuhan PAD	140	-6,80	14,78	3,3021	4,23946
Alokasi Belanja Modal	140	4,82	22,94	12,5106	3,67709

Sumber data SPSS 2026

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap 140 data pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Rasio Kemandirian menunjukkan variasi tinggi antar daerah dengan rata-rata rendah hingga sedang, menandakan kesenjangan antara daerah mandiri dan yang bergantung pada pemerintah pusat. Rasio Efektivitas rata-rata di atas 100, menunjukkan sebagian besar daerah mampu merealisasikan pendapatan sesuai atau melampaui target. Rasio Efisiensi relatif stabil antar daerah, sedangkan Rasio Pertumbuhan menunjukkan fluktuasi dengan beberapa daerah mengalami penurunan PAD. Alokasi Belanja Modal memiliki distribusi yang relatif homogen dengan rata-rata sedang, menandakan pengeluaran untuk aset tetap tidak menyimpang jauh antar daerah. Secara keseluruhan, data menggambarkan kinerja keuangan daerah yang bervariasi pada kemandirian dan pertumbuhan, tetapi relatif konsisten pada efektivitas, efisiensi, dan alokasi belanja modal.



**Uji Asumsi Klasik****Uji Normalitas**

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,892
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,403

Sumber data SPSS 2026

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test* terhadap nilai *Unstandardized Residual* value dari model regresi. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,403 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dari *output* di atas menunjukkan data residual terdistribusi normal dan tidak terjadi penyimpangan. Hal tersebut diperkuat dengan nilai test *statistic* sebesar 0,075 dan nilai *mean residual* sebesar 0,0000000 yang menunjukkan residual terdistribusi seimbang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan untuk analisis regresi linier berganda.

**Uji Multikolinieritas**

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

		Collinearity Statistics		Keterangan
Model		Tolerance	VIF	
(Constant)				
1	Rasio Kemandirian	0,967	1,034	Tidak Terjadi Multikolinieritas
	Rasio Efektivitas	0,796	1,256	Tidak Terjadi Multikolinieritas
	Rasio Efisiensi	0,759	1,318	Tidak Terjadi Multikolinieritas
	Rasio Pertumbuhan PAD	0,905	1,105	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber data SPSS 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Pertumbuhan PAD memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, masing-masing sebesar 0,967 dan 1,034 untuk rasio kemandirian, 0,796 dan 1,256 untuk rasio efektivitas, 0,759 dan 1,318 untuk rasio efisiensi, serta 0,905 dan 1,105 untuk rasio pertumbuhan PAD. Dari *output* tersebut terindikasi bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi, sehingga setiap variabel bebas tidak saling memengaruhi secara linear yang kuat. Seluruh variabel dalam model dapat digunakan untuk menjelaskan Alokasi Belanja Modal secara independen dan hasil estimasi regresi dapat diinterpretasikan secara valid.

**Uji Heteroskedastisitas**

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Model	Sig.	Keterangan
1	Rasio Kemandirian	0,223	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
	Rasio Efektivitas	0,777	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
	Rasio Efisiensi	0,996	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
	Rasio Pertumbuhan PAD	0,259	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber data SPSS 2026

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, pengujian dikajukan menggunakan metode Uji Glejser. Berdasarkan hasil *output* pada tabel diatas diketahui bahwa variabel Rasio Kemandirian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,223, Rasio Efektivitas sebesar 0,777,

Rasio Efisiensi sebesar 0,996, dan Rasio Pertumbuhan PAD sebesar 0,259. Dalam Uji Glejser, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolut residual* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hal ini, selaras dengan hasil *output* diatas karena seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi yang jauh melampaui standar 0,05, maka secara statistik model regresi ini telah memenuhi syarat asumsi klasik, sehingga model ini sangat layak digunakan untuk memprediksi pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal

### Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,611

Sumber data SPSS 2026

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel error pada periode t dengan periode t-1, dan dalam penelitian ini diterapkan menggunakan Uji Run Test. Hasil menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,611, jauh lebih besar dari batas signifikansi 0,05, sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan pada periode t tidak dipengaruhi oleh gangguan periode sebelumnya, sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi dan model regresi layak digunakan untuk pengujian selanjutnya.

### Uji Hipotesis

#### Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0,350	7,505		-0,047	0,963
1 Rasio Kemandirian	0,097	0,017	0,441	5,646	0,000
Rasio Efektivitas	0,033	0,025	0,111	1,288	0,200
Rasio Efisiensi	0,070	0,059	0,105	1,186	0,238
Rasio Pertumbuhan PAD	-0,105	0,070	-0,121	-1,497	0,137

Sumber data SPSS 2026

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$ABM = -0,350 + 0,097 RK + 0,033 R_{Efisiensi} + 0,070 R_{Efektivitas} - 0,105 PP + e$$

Interpretasi persamaan regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar -0,350 mengindikasikan alokasi belanja modal diprediksi sebesar -0,350 jika Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, dan Pertumbuhan PAD tetap nol. Koefisien Rasio Kemandirian sebesar 0,097 menunjukkan peningkatan 1% akan menaikkan alokasi belanja modal 9,7%, Rasio Efektivitas 0,033 menaikkan alokasi 3,3%, Rasio Efisiensi 0,070 menaikkan alokasi 7%, sedangkan Rasio Pertumbuhan PAD -0,105 justru menurunkan alokasi sebesar 10,5% setiap kenaikan 1%, sehingga terlihat pengaruh positif sebagian besar rasio kecuali pertumbuhan PAD yang negatif

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 8. Hasil Kelayakan Model (Uji F)

Model	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Sig.	Keterangan
1	8,724	2,44	0,000 <sub>b</sub>	Model fit

Sumber data SPSS 2026

Noted : penjelasan model fit

Berdasarkan hasil uji F (uji simultan) yang ditampilkan pada tabel ANOVA, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $<0,05$ ) dan nilai F hitung sebesar 8,724 yang lebih besar dari F tabel 2,44, Nilai signifikansi penelitian menunjukan Uji F Hipotesis  $H_1$  diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan PAD terhadap variabel dependen, sehingga model regresi ini dinyatakan fit untuk digunakan dalam uji selanjutnya karena nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $<0,05$ ).

#### Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9. Uji Parsial (Uji t)

	Model	t	Sig.	Kesimpulan
1	Rasio Kemandirian	5,646	0,000	$H_1$ diterima
	Rasio Efektivitas	1,288	0,200	$H_2$ ditolak
	Rasio Efisiensi	1,186	0,238	$H_3$ ditolak
	Rasio Pertumbuhan PAD	-1,497	0,137	$H_4$ ditolak

Sumber data SPSS 2026

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 9, hanya Rasio Kemandirian yang berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, dengan t hitung 5,646  $>$  t tabel 1,977 dan signifikansi 0,000  $<$  0,05 ( $H_1$  diterima). Sementara itu, Rasio Efektivitas (t = 1,288, sig. 0,200), Rasio Efisiensi (t = 1,186, sig. 0,238), dan Rasio Pertumbuhan PAD (t = -1,497, sig. 0,137) tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, sehingga  $H_2$ ,  $H_3$ , dan  $H_4$  ditolak.

#### Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,453a	0,205	0,182

Sumber data SPSS 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel *Model Summary*, diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 0,182. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan PAD) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Alokasi Belanja Modal) adalah sebesar 18,2%. Sementara itu, sisanya sebesar 81,8% (100% - 18,2%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

#### Pembahasan

##### Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil uji statistik yang diperoleh pada Uji Parsial (t) yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,646 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,977 dan signifikansi 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka  $H_1$  diterima. Hal ini sejalan dengan teori agensi karena mencerminkan hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan pemerintah pusat serta masyarakat sebagai prinsipal. Rasio Kemandirian yang tinggi tercermin dari besarnya PAD yang menciptakan kebebasan mengalokasikan dana dalam sektor belanja modal untuk mengurangi ketimpangan informasi. Pemerintah daerah berusaha menunjukkan kinerja secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat melalui pembedaan infrastruktur dan pelayanan publik.

Penelitian ini selaras dengan penelitian (R. S. Putri & Rahayu, 2019a) yang menyatakan bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. (Talunewo et al., 2020) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintah dapat

meningkatkan PAD dan akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah yang tinggi. Namun, berbanding terbalik dengan temuan (Bayu Kusumaningrum & Sugiyanto, 2021) yang menyatakan bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variable dependen. Pengaruh.

#### **Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Alokasi Belanja Modal**

Hasil uji statistik yang diperoleh pada Uji Parsial (t) yang menunjukkan bahwa t hitung sebesar 1,288 yang lebih kecil dari nilai t tabel 1,977 dan nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  maka  $H_2$  ditolak. Rasio efektivitas merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan. Secara teoretis, tingkat efektivitas yang tinggi seharusnya memberikan kepastian dana untuk membiayai program pembangunan. Apabila dikaitkan dengan teori agensi Rasio Efektivitas yang tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal dapat mengindikasikan adanya kegagalan atau ketimpangan informasi dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat. Meskipun pemerintah mampu mencapai target pendapatan secara efektif namun pengalokasiannya tidak tepat seperti dialokasikan pada belanja operasional maka hal tersebut menguntungkan birokrasi itu sendiri. Sehingga, efektivitas pengumpulan pendapatan tidak dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik kepada prinsipal dalam bentuk aset produktif.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Andriyani et al., 2020) Rasio Efektivitas terhadap Alokasi Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan. Kemudian, penelitian ini juga didukung (Fajriati & Anwar, 2022b) Rasio Efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. (Hidayat et al., 2024) juga mendukung temuan ini dengan menjelaskan bahwa naik atau turunnya belanja modal tidak dipengaruhi oleh peningkatan efektivitas PAD.

#### **Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Alokasi Belanja Modal**

Hasil uji statistik yang diperoleh pada Uji Parsial (t) yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,186 yang lebih kecil dari t tabel 1,977, sedangkan untuk nilai signifikansi sebesar 0,238 lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  maka  $H_3$  ditolak. Pada dasarnya Rasio Efisiensi mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Secara teoritis, ketidakpengaruhan Rasio Efisiensi terhadap Alokasi Belanja Modal disebabkan adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain asimetri informasi, dimana agen memanfaatkan surplus efisiensi untuk pos belanja yang menguntungkan birokrasi daripada dialokasikan terhadap belanja modal. Selain itu, hal ini dapat terjadi karena adanya regulasi mengenai *mandatory spending* (belanja wajib) yang sudah memiliki presentasi tertentu seperti untuk biaya pendidikan dan layanan kesehatan sehingga agen tidak leluasa dalam mengalokasikan dana kedalam pos belanja lainnya.

Penelitian ini selaras dengan (Fajriati & Anwar, 2022b) yang menyatakan bahwa Rasio Efisiensi belanja daerah baik secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan (Sarina Dewi et al., 2022) yang berpendapat bahwa Belanja Modal akan meningkat berbanding lurus dengan efisiensi keuangan daerah. Kemudian, dipertegas

(Rahmadini et al., 2024) bahwa terdapat pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.

### **Pengaruh Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD terhadap Alokasi Belanja Modal**

Hasil uji statistik yang diperoleh pada Uji Parsial (t) yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -1,497 yang secara absolut lebih kecil dari t tabel 1,977 dan nilai signifikansi sebesar 0,137 lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  maka  $H_4$  ditolak. Rasio Pertumbuhan PAD digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Berdasarkan teori agensi, ketidakpengaruhan Pertumbuhan PAD terhadap Alokasi Belanja Modal dipicu adanya asimetri informasi. Hal ini disebabkan, pemerintah sebagai agen lebih memprioritaskan alokasi dana pada belanja yang memberikan manfaat pada birokrasi seperti belanja pegawai, daripada mengalokasikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sebagai prinsipal. Akibatnya, meskipun terjadi pertumbuhan PAD dana tersebut tidak digunakan untuk meningkatkan aset publik karena agen lebih mementingkan pemenuhan kewajiban rutin yang minim terhadap resiko pengawasan langsung dari prinsipal.

Penelitian ini didukung (I. G. Siregar, 2022) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan (Sarina Dewi et al., 2022) yang berpendapat bahwa pertumbuhan PAD yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (Oktavianti & Idayati, 2020) memperkuat pernyataan bahwa Pertumbuhan Asli Daerah yang diukur menggunakan total aset berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Belanja Modal.

## **5. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tahun 2021–2024, ditemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, menunjukkan bahwa daerah yang mampu membiayai kebutuhan sendiri melalui PAD cenderung lebih mampu meningkatkan belanja modal, sedangkan rasio efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan PAD tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini terbatas pada empat variabel kinerja keuangan dan data sekunder dari BPK, serta hanya mencakup wilayah Jawa Tengah, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, disarankan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan mengawasi pengalokasian belanja modal agar lebih produktif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain seperti DAK, DAU, DBH, dan leverage, memperluas cakupan wilayah, dan memperpanjang periode pengamatan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi alokasi belanja modal.

## **6. Daftar Pustaka**

Aini, N., Bukit, R. B., & Situmeang, C. (2024). Factors that influence financial performance with capital expenditure as a moderating variable in the regency/city government of Sumatera Utara Province. *International Journal of Research and Review*, 11(8), 294–308.

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. *Pajak dan Keuangan Negara*, 83–93.
- Andriyani, N. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(2), 132–144.
- Andriyani, N., Mukhzarudfa, & Diah, E. P. A. (2020). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal (Studi di kabupaten/kota Provinsi Jambi tahun 2014–2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(2), 132–144.
- Ayuni, R., Sari, K. R., & Fithri, E. J. (2023). Pengaruh efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, dan efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi se-Sumatera. *Student Research Journal*, 1(5), 114–131.
- Babarinde, G. F., Ajao, J. O., Adeluwusi, O. A., & Hassan, H. (2022). Causality analysis of internally generated revenue, capital expenditure, and fiscal stress. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 24, 42–54.
- Bayu Kusumaningrum, E., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, fiscal stress, dan kepadatan penduduk terhadap alokasi belanja modal pada Provinsi Kalimantan Utara. *Ekonomi Bisnis*, 27(2), 630–632.
- Fajriati, C. E., & Anwar, H. S. (2022a). Alokasi belanja modal pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2011–2020. *MODERAT*, 8(3), 436–451.
- Fajriati, C. E., & Anwar, H. S. (2022b). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2011–2020. *MODERAT*, 8(3), 436–451.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85–100.
- Hidayat, T., Permatasari, M. D., & Aeni, P. (2024). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan kinerja keuangan terhadap belanja modal Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(1), 105–115.
- Santika, I. P., & Adnyana, I. B. M. P. (2022). Kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Journal of Applied Management Studies*, 3(2), 173–190. <https://doi.org/10.51713/jamms.v3i2.54>
- Lestari, R. I., & Basuki, P. (2024). The effect of economic growth, local original revenue, general allocation fund, special allocation fund, and profit sharing fund on capital expenditure of the NTB Provincial Government. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 7(1), 62–70. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i01-10>
- Mubarok, M. H., Nasution, A. A., & Kesuma, S. A. (2022). Local government financial performance: The effects of capital expenditure and intergovernmental revenue. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 9(6), 503–512. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364>
- Nabanan, J. H., & Shahrullah, R. S. (2021). Peranan otonomi daerah terhadap pembangunan ekonomi melalui pengelolaan keuangan daerah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 108–116.
- Novita, I., & Nurhasanah, N. (2020). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal. *Buana Ilmu*, 4(2), 64–77.

- Oktavianti, Y. A., & Idayati, F. (2020). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(11), 1–20.
- Putri, A., Herdika, M., Fendita, X., & Fratiwi. (2022). Desentralisasi sebagai upaya penanggulangan problematika serta tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 400–408.
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat. *JASa: Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(2), 256–268. <https://doi.org/10.36555/jasa.v3i2.429>
- Rahmadini, D., Indriani, R., & Febriana, N. (2024). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2783–2795. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2069>
- Sarina Dewi, A., Masnila, N., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea*, 4(6).
- Setiawan, F. P. (2019). *Pengaruh rasio keuangan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah tertinggal di Indonesia* (Skripsi). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Setiawati, E., Putri, E., & Devista, N. (2021). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 56–67.
- Siregar, A. O. D., & Siregar, I. M. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintahan (Studi kasus Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat). *IMAGE*, 9(1), 1–19.
- Siregar, I. G. (2022). Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. *Dynamic Management Journal*, 6(2), 175–192.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- Sularsono, H., & Restianto, Y. E. (2019). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 11(1), 1–14.
- Suriadi, H., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210.
- Talumewo, K. D. K. S., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. L. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(2), 1–13.
- Tran, M. H., & Nguyen, N. T. (2024). Impacts of fiscal decentralization on performance of local government expenditure: Evidence from Vietnam. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(6), 1–32.
- Ula, N., & Bharata, R. (2022). Analisis rasio keuangan dalam APBD untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 2(5), 405–414.